



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)**

**TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT KOTA BIMA**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bima Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu upaya sistimatis dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun Ketiga pelaksanaan RPJM lima tahunan masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bima Tahun 2022 disusun sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan Implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan beberapa urusan wajib dan urusan pilihan untuk menentukan program kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dalam perencanaan stategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh karena itu untuk masa 5 (lima) tahun kedepan harapan yang sama yang diinginkan oleh organisasi Inspektorat Kota Bima guna mewujudkan wisi dan misi pembanguna Kota Bima menuju Masuarakat yang sejahtera .

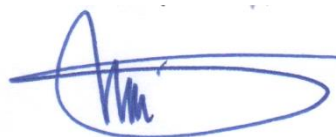
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif beserta sumbernya serta prakiraan

maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bima Tahun anggaran 2022 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja (RENJA) pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik Pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RENSTRA Inspektorat Kota Bima.

Kota Bima, Juli 2021  
Inspektur,



**Muhaimin, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 19620217 199003 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....		i
Daftar Isi .....		iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Dasar Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Terhadap Capaian Rencana Strategis .....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	20
	2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat.....	35
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
	2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	49
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>50</b>
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB.....	50
	3.2 Tujuan dan Sasaran.....	52
	3.3 Program Dan Kegiatan .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>

### DAFTAR TABEL

1.	Table 2.1.1	Sasaran Program Dan Kegiatan Serta Anggaran Tahun 2020	6
2.	Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2020	11
3.	Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bima Kinerja Utama	21
4.	Tabel 2.2.2	Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima	30
5.	Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Bima	41
7.	Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat 2019-2023	53
8.	Tabel 3.3.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima Tahun 2020	56

9.	Tabel 3.3.2	Indikator Kinerja Utama dan Program Kegiatan Utama Tahun 2020	58
10	Tabel 3.3.3	Program Dan Kegiatan Rutin Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	64
11.	Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Inspektorat Kota Bima	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bima ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Periode 2018 - 2023 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dimana keduanya merupakan bagian utuh dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan Implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Sipil Negara Lingkup Inspektorat Daerah Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga target kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini yang secara simultan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bima Tahun 2022 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

## **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234););
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kota Bima ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2022 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2022 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Dari gambaran tersebut diatas maka tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Bima dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat;
3. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi- fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
4. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan Pemerintahan Yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governmen*

#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistimatika penulisan RENJA ini terdiri dari :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Tujuan
- I.4. Sistimatika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2019 )**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV. PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran dan hasil dari kegiatan dan program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Oleh karena itu evaluasi rencana kerja tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi.

Adapun hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Kota Bima terhadap kinerja program dan kegiatan serta kinerja sasaran tahun lalu dapat dijelaskan dibawah ini :

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Terhadap Capaian Rencana Strategis ( Renstra )

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) tahun 2020 terhadap pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bima sebagaimana tersebut dibawah ini.

Pada tahun 2020 Inspektorat Kota Bima melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 41 (empat puluh satu) Kegiatan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.656.140.044 atau 98,81 %. Adapun sasaran dan anggaran dari masing – masing program dan kegiatan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

**Table 2.1.1**

#### **Sasaran Program Dan Kegiatan Serta Anggaran Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)
a.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.180.295.174,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia dan terdistribusinya surat menyurat	105.300.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi,	Terpenuhinya kebutuhan	21.078.000,00

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)
	sumber daya air dan listrik	pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	4.800.000,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5.100.000,00
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan Keuangan	66.060.000,00
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertata dan terpeliharanya kantor	110.280.000,00
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	6.400.000,00
8	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pelayanan penatausahaan administrasi perkantoran	48.507.000,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan penatausahaan administrasi perkantoran	51.350.000,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	34.850.000,00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.000.000,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	48.600.000,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	666.970.174,00
<b>b.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>34.000.000,00</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	6.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	28.000.000,00
<b>c.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>8.500.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.500.000,00
<b>d.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>107.750.000,00</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	77.800.000,00
2	Pelaksanaan Penilaian AKJG	Terlaksananya Penilaian AKJG	29.950.000,00
<b>e.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Inspektorat</b>	<b>208.848.500,00</b>

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)
	<b>keuangan</b>		
1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan	12.850.000,00
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA	48.843.000,00
3	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya dokumen Laporan LAKIP, LPJ dan LPPD	26.227.500,00
4	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	18.402.500,00
5	Reviu LAKIP Kota Bima	Tersedianya Dokumen Reviu SAKIP Pemerintah Kota Bima	19.430.000,00
6	Reviu RKA	Tersedianya Dokumen Reviu RKA Pemerintah Kota Bima	45.270.000,00
7	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima	20.522.500,00
8	Evaluasi Pelayanan Publik	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bima	0,00
9	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	17.303.000,00
<b>f.</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah</b>	<b>132.339.500 ,00</b>
1	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah	15.859.500,00
2	Review Penyerapan Anggaran	Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	89.640.000,00
3	Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	26.840.000,00
<b>g.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material</b>	<b>1.812.451.826,00</b>
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	709.580.000,00
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Tertanganinya Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	307.800.000,00
3	Pengendalian Manajemen	Terlaksananya pencengahan	117.550.000,00

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan KDH	penyimpangan perencanaan, pelaksanaan barang dan jasa pemerintah	
4	Inverisasi temuan pengawasan	Tersedianya dokumen hasil pengawasan	18.860.000,00
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK	315.145.000,00
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya Koordinasi Pengawasan	298.777.826,00
7	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Terlaksananya Evaluasi Hasil temuan	44.739.000,00
8	Pemantauan LHKASN	Meningkatnya kesadaran ASN yang menyampaikan laporan Harta Kekayaan	0,00
<b>h.</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>215.815.000,00</b>
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	26.295.000,00
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terlaksananya Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	135.520.000,00
3	Bimtek Pengawasan Operasional	Terlaksananya Bimtek pengawasan Operasional	54.000.000,00

Untuk mengetahui sejauhmana capaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas, maka dilakukan pengukuran atas indicator dan target dari masing - masing program dan kegiatan tersebut melalui evaluasi hasil capaian program dan kegiatan yang merupakan bagian penting dari hasil pelaksanaan rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA-OPD) tahun 2020 terhadap pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bima. Adapun hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diatas, dapat dijelaskan:

**TABEL 2.1.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD**  
**SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**OPD : Inspektorat Kota Bima**

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.4.02.01.01.01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	1400 Eks	1390 Eks	1400 Eks	1390 Eks	99%	1000 Eks	1000 Eks	100%
4.02.4.02.01.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.4.02.01.01.03	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
4.02.4.02.01.01.04	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.01.07	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4.02.4.02.01.01.08	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	8 Ruangan	8 Ruangan	8 Ruangan	8 Ruangan	100%	8 Ruangan	8 Ruangan	100%
4.02.4.02.01.01.09	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
4.02.4.02.01.01.10	8 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	1485 BH/PCS/Rim	1485 BH/PCS/Rim	1485 BH/PCS/Rim	1485 BH/PCS/Rim	100%	1485 BH/Pcs/Rim	1485 BH/Pcs/Rim	100%
4.02.4.02.01.01.11	9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	155.000 Lembar	155.000 Lembar	155.000 Lembar	155.000 Lembar	100%	155.000 Lembar	155.000 Lembar	100%
4.02.4.02.01.01.112	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
4.02.4.02.01.01.15	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	1191 Eks	1191 Eks	1191 Eks	1191 Eks	100%	1191 Eks	Eksemplar	100%
4.02.4.02.01.01.17	12 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	85 Orang	85 Orang	85 Orang	85 Orang	100%	75 Orang	75 Orang	100%



KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.01.18	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
<b>4.02.4.02.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.02.4.02.01.02.09	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%
4.02.4.02.01.02.22	2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan Kantor yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	8 Ruangan	8 Ruangan	100%
4.02.4.02.01.02.24	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
<b>4.02.4.02.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah ASN yang mendapatkan sanksi disiplin</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0%</b>	<b>1 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>1%</b>
4.02.4.02.01.03.02	1 Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN	50 Lembar	50 Lembar	50 Lembar	50 Lembar	100%	51 Lembar	51 Lembar	100%
4.02.4.02.01.03.03	2 Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk ASN								

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah APIP yang mengikuti diklat pembentukan/Inpasing/diklat PIM	13 Orag	13 Orag	13 Orag	13 Orag	50%	7 Org	8 Org	30,77%
4.02.4.02.01.05.01	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
4.02.4.02.01.05.05	2 Pelaksanaan Penilaian AKJG	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Diklat Subtantif	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	26 Orang	26 Orang	100%
4.02.4.02.01.05.06	3 Seminar, Simposium, Lokakarya dan pertemuan ilmiah	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	0%
4.02.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.4.02.01.06.04	1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.06.05	2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	5 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.06	3 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen Aukuntabilitas Kinerja yang terselesaikan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.07	4 Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.08	5 Reviu LAKIP Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu SAKIP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.09	6 Reviu RKA	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.10	7 Penilaian mandiri Reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.11	8 Evaluasi pelayanan publik	Jumlah Dokumen Laporan Hasil evaluasi pelayanan publik	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.06.12	9 Verifikasi Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
4.02.4.02.01.06.13	10 Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran hasil evaluasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	0 Dok	0 Dok	0%
<b>4.02.4.02.01.18</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Sesuai</b>
4.02.4.02.01.18.07	1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Laporan keuangannya Sesuai dengan SAP	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	100%	29 OPD	29 OPD	100%
4.02.4.02.01.18.08	2 Reviu Penyerapan anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.4.02.01.18.09	3 Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa	Persentase Penyerapan Anggaran PBJ (belanja Modal)	99%	99%	99%	99%	100%	99%	93%	94%
<b>4.02.4.02.01.20</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian</b>	<b>Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK</b>	<b>59,62%</b>	<b>61,06%</b>	<b>59,62%</b>	<b>61,06%</b>	<b>93,55%</b>	<b>48,08%</b>	<b>48,08%</b>	<b>100,00%</b>

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>pelaksanaan kebijakan KDH</b>									
4.02.4.02.01.20.01	1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	100%
4.02.4.02.01.20.02	2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaa Pengaduan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	10 Laporan	11 Laporan	110%
4.02.4.02.01.20.03	3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaa Pengaduan Saber pungli	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.4.02.01.20.05	4 Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Inverisasi temuan pengawasan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
4.02.4.02.01.20.06	5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.4.02.01.20.07	6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	15 Dok	15 Dok	100%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.20.08	7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	100% (4 Dok)	100% (4 Dok)	100% (4 Dok)	100% (4 Dok)	100%	100% (4 Dok)	100% (4 Dok)	100%
4.02.4.02.01.20.10	8 Pemantauan LHKASN	Jumlah Pemantauan LHKASN dan LHKPN	4 kali/4 Dokumen Pemantauan	4 kali/4 Dokumen Pemantauan	4 kali/4 Dokumen Pemantauan	4 kali/4 Dokumen Pemantauan	100%	4 kali/4 Dokumen Pemantauan	4 kali/4 Dokumen Pemantauan	100%
<b>4.02.4.02.01.21</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtasi, penjurangan, dan profesi</b>	<b>43,48%</b>	<b>43,48%</b>	<b>43,48%</b>	<b>43,48%</b>	<b>100%</b>	<b>30,77%</b>	<b>31%</b>	<b>100,00%</b>
4.02.4.02.01.21.01	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Pendidikan penjurangan	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	14 Orang	100%
4.02.4.02.01.21.02	2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Diklat Substantif	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	100%	24 Orang	24 Orang	100%
4.02.4.02.01.21.03	3 Bimtek Pengawasan Operasional	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	100%	19 Orang	19 Orang	100%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2014 s/d TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			Target Prog Keg (Renja PD Tahun 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.02.4.02.01.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penyelesaian dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%			
4.02.4.02.01.22.02	1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%			
4.02.4.02.01.23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah Dokumen layanan publik	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%			
4.02.4.02.01.23.02	1 Penyusunan informasi terhadap layanan publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang terdokumentasi	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%			
4.02.4.02.01.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%	60%	100%			
4.02.4.02.01.24.01	1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang terdokumentasi	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%			

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat :



**Tabel 2.2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bima Kinerja Utama**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	OPINI BPK		WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP									
	INDEK SAKIP		A		B	BB	BB	A	A	B									
1	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material		100,00%		60,98%	70,73%	80,49%	90,24%	100,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK			98,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	65,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima		Terdefinisi (3,80)		Berkembang (2,80)	Terdefinisi (3,10)	Terdefinisi (3,40)	Terdefinisi (3,60)	Terdefinisi (3,80)	Berkembang (2,40)	-	-	-	-	85,71%	-	-	-	-
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B.		100,00%		93,10%	82,35%	88,24%	92,12%	100,00%	93,10%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
5	Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM			80,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota		Level 4		Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
7	Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat			40	33	35	37	39	40	33	-	-	-	-	100,00%				

Dari hasil evaluasi atas capaian hasil dari ketujuh sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif ,efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1) Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material.

Jumlah OPD yang dijadikan target dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 41 OPD atas temuan berulang dilihat dari beberapa belanja antara lain belanja pendapatan, belanja modal, Belanja SPPD, belanja Honorarium, dengan kriteria temuan lebih dari satu kali atas belanja tersebut. Adapun baseline data temuan tahun 2013 dimana OPD yang tidak mendapat temuan sebanyak 36 OPD atau hanya 5 OPD yang mendapatkan temuan yang berulang.

Adapun hasil evaluasi dari indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material rata-rata capaian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar 72,28% dari rata – rata target 46,33%. Besarnya capaian kinerja pada indikator kinerja ini disebabkan oleh semakin membaiknya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh OPD serta semakin membaiknya sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh OPD dilingkup pemerintah Kota Bima. Disamping semakin membaiknya beberapa aspek pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut diatas, target indikator yang disajikan masih rendah sehingga belum sebanding/ seimbang dengan realisasi serta capaian yang telah diraih dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Untuk itu masih diperlukan perbaikan atas target untuk indikator dalam rencana strategis lima tahun yang akan datang mengingat pasti akan adanya temuan – temuan yang berulang yang ditemukan dalam pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh APIP maupun Eksternal (BPK) yang bersifat audit dengan tujuan tertentu.

2) Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

Komitmen pemerintah daerah akan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bima dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan

dilihat dari komitmen pimpinan, komitmen pegawai sekaligus tim teknis TLHP dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas jalannya organisasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh Inspektorat (internal auditor) salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditi untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh APIP. Penyelesaian TLHP yang merupakan perwujudan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bima tercermin dalam data pemantauan tindak lanjut tahun 2017 sampai dengan bulan Desember TA 2020. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94 rekomendasi atau 72,31 % dari 130 rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi atau sebesar 8,63 %, serta rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atau sebesar 0 %. Jika dilihat *progress* TLHP tahun 2020 sebanyak 21 rekomendasi atau 65,63 % dari target sebanyak 32 rekomendasi atau 90,00% dengan capaian sebesar 72,92% ini mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu) serta respon pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggung jawab dalam hal tindak lanjut masih kurang. Dari gambaran tersebut diatas dapat dikatakan belum optimalnya dukungan/keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TLHP sebagai wujud akuntabilitas.

3) Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi atau Pengendalian telah dirancang

secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan pedoman BPKP, merincikan level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

Level	Keterangan	Interval Skor
Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.	Kurang dari 1,0 (0<skor<1,0)
Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0≤skor<2,0)
Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0≤skor<3,0)
Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0≤skor<4,0)
Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0≤skor<4,5)
Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤skor≤5)

Pada tahun 2020 indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance *berkembang (2,80)* terealisasi *berkembang (2,40)* atau tercapai sebesar 85,71%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

*Keberhasilan pencapaian target ini* lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik internal OPD maupun dari Inspektorat sendiri. Salah satu fungsi Inspektorat Kota Bima adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan SPIP dimana didalamnya terdapat lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur SPIP. beberapa faktor internal OPD antara lain tersedia petunjuk teknis dan atau Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan, semakin membaiknya penerapan dari Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan yang telah ada, semakin menguatnya penerapan penegakan integritas dan nilai etika, semakin kuatnya komitmen pada kompetensi terlebih pada tahun 2020 atas

penyelenggaraan SPIP sehingga berpengaruh pada tercapainya indikator kinerja ini.

- 4) Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B dimana pada 2015 capaian untuk indikator ini sebanyak 18 OPD atau 62,07 % dari total OPD dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 62,07 % demikian pula pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian tersebut mampu dipertahankan sebesar target keberhasilan yang ditentukan dengan realisasi 93,10% OPD atau capaian sebesar 100,00,% dengan target 27 OPD dari total sebanyak 29 OPD dengan rata capaian dengan nilai B. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reuiu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - target yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencanaan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan

demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggung jawabkan.

5) Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM

untuk tahun 2020 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu pada tahun 2020 ini data yang dijadikan ukuran keberhasilan kinerja adalah capaian kinerja hasil penilaian tahun 2016 dengan target 37,93 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 37,93 % dengan hasil Zona kepatuhan pada posisi hijau atau nilai sebesar 89,43. Sedangkan untuk target tahun 2019 sendiri adalah sebesar 20,00% yang menerapkan WBK/WBBM dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 37,93% dengan capaian untuk tahun 2019 base line data tahun 2016 sebesar 44%. Dari data tersebut diatas indikator kinerja ini belum mencapai target yang diharapkan. Adapun faktor belum berhasilnya pencapaian target ini antara lain belum membaiknya penerapan manajemen perubahan dalam organisasi pemerintahan khususnya OPD, belum optimalnya penataan tatalaksana organisasi pemerintahan khususnya OPD kordinatif, belum optimalnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia pada pemerintah daerah, belum optimalnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan pengawasan serta belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh OPD yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas.

b. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

1) Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit

intern. Kapabilitas audit intern umumnya terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Level kapabilitas unit audit intern adalah sebagai berikut : (1) initial; (2) infrastructure; (3) integrated; (4) managed; dan (5) optimizing. Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dengan meningkatnya ukuran atau kompleksitas organisasi atau risiko terkait dengan kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada masing-masing level kapabilitas di atas terdapat enam elemen audit intern, yaitu (1) peran dan layanan audit intern, (2) manajemen SDM, (3) praktik profesional, (4) manajemen kinerja dan akuntabilitas, (5) hubungan dan budaya organisasi, dan (6) struktur tata kelola. Elemen (1) sampai dengan (4) merupakan area peningkatan yang sepenuhnya bergantung pada upaya dari aktivitas audit intern sendiri untuk mewujudkannya. Sedangkan elemen (5) dan (6) juga mencakup hubungan aktivitas audit intern dengan organisasi yang didukungnya serta dengan lingkungan internal dan eksternal.

Pada tahun 2020 indikator Level Kapabilitas APIP target Level 3 atau berkembang, hasil peningkatan kapabilitas menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi pada tingkat Level 3 (berkembang) atau dari target Level 3 (berkembang) dengan capaian sebesar 100 % (berkembang) dari target yang ditentukan atau sudah mencapai target.

Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur, serta terpenuhinya standar level kapabilitas sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern yaitu :

- Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi.
- Manajemen serta praktik profesional unit audit intern telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan audit intern.
- Unit audit intern mulai menyelaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi organisasi.

- Unit audit intern berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko.
- Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan audit intern, independensi serta objektivitas.
- Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

2) Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja penting kerana merupakan cerminanan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Inspektorat Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Perlu dijelaskan bahwa sebelum tahun 2015 belum terdapat tenaga fungsional auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kota Bima, baru pada tahun 2015 dibuka inspassing oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2015 jumlah auditor sebanyak 20 (dua puluh) orang (base data) diangkat dalam jabatan fungsional. Walaupun tenaga fungsional telah diangkat dalam jabatan fungsional namun belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis fungsional dan penjenjangan secara memadai. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mulai adanya peningkatan kapabilitas melalui optimalisasi kerjasama dalam bentuk peningkatan kapabilitas APIP dengan BPKP selaku pembina APIP di daerah. Sehingga secara kualitas mulai terjadi peningkatan, hal tersebut ditunjukkan dengan mulai meningkatnya tenaga fungsional yang memiliki sertifikat keahlian, penjenjangan. Walaupun secara kuantitas tenaga fungsional masih tertabas dimana sampai dengan tahun 2020 baru sebanyak 33 orang dari target yang diharapkan terpenuhi sampai dengan akhir masa renstra sejumlah 41 orang tenaga fungsional. hal tersebut disebabkan karena adanya mutasi dari jabatan fungsional kejabatan struktural, meninggal dunia, terbatasnya rekrutmen oleh pemerintah daerah, masih kurangnya minat ASN lain untuk menduduki jabatan fungsional, kurangnya penghargaan dan pengembangan karir yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga fungsional Inspektorat, lebih



lanjut hal lainnya adalah terbatasnya anggaran diklat bagi yang telah menduduki jabatan fungsional terutama tenaga fungsional P2UPD dan tenaga fungsional umum. Namun secara keseluruhan tenaga fungsional telah mengikuti dan memiliki sertifikat untuk diangkat dalam jabatan fungsional telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% atau sebanyak 33 orang ditahun 2020. Namun bila kita dibandingkan jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional baik Auditor maupun P2UPD pertahunnya mengalami peningkatan hal tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan untuk itu dan adanya peluang yang dibuka oleh pemerintah pusat melalui pola Inspassing, serta semakin membaiknya pola komunikasi dan koordinasi antara sesama APIP terutama BPKP perwakilan provinsi NTB selaku pembina APIP yang ada di NTB, terkait dengan penyelenggaraan diklat fungsional sehingga dapat merangsang minat sumberdaya aparatur baik didalam maupun diluar APIP Kota Bima untuk menjadi tenaga fungsional APIP diKota Bima.

Disamping gambaran sasaran dan indikator pelayanan Inspektorat sebagaimana di uraikan diatas, maka salah satu yang aspek yang sangat menentukan terlaksananya kinerja pelayanan adalah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kinerja tersebut, maka berikut ini disajikan anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan inspektorat Kota Bima dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2013-2018.

**Tabel : 2.2.2**  
**Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima**

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	608.528.950	668.331.533	912.428.250	919.815.676	1.180.295.174	605.919.702	668.149.276	910.770.999	918.257.744	1.176.746.955	864.116.417	862.112.035
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 28.130.000,00	Rp 37.400.000,00	Rp 51.525.000,00	Rp 54.200.000,00	Rp 105.300.000,00	Rp 28.120.830,00	Rp 37.389.030,00	Rp 51.075.000,00	Rp 54.170.000,00	Rp 105.270.000,00	Rp 55.311.000,00	Rp 55.204.972,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 12.988.900,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 21.078.000,00	Rp 11.705.083,00	Rp 17.938.455,00	Rp 17.868.428,00	Rp 18.080.267,00	Rp 20.582.056,00	Rp 17.813.380,00	Rp 17.234.857,80
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 21.007.000,00	Rp 27.169.600,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 4.800.000,00	Rp 20.955.500,00	Rp 27.153.000,00	Rp 6.580.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 4.800.000,00	Rp 13.115.320,00	Rp 13.097.700,00
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 1.250.000,00	Rp 1.026.300,00	Rp 500.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 1.055.500,00	Rp 1.026.300,00	Rp 362.000,00	Rp 5.395.000,00	Rp 4.366.140,00	Rp 2.695.260,00	Rp 2.440.988,00
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 35.184.000,00	Rp 50.160.000,00	Rp 63.735.000,00	Rp 64.260.000,00	Rp 66.060.000,00	Rp 34.890.800,00	Rp 50.160.000,00	Rp 63.712.000,00	Rp 64.246.000,00	Rp 66.040.000,00	Rp 55.879.800,00	Rp 55.809.760,00
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 22.021.500,00	Rp 31.278.500,00	Rp 51.588.000,00	Rp 64.655.000,00	Rp 110.280.000,00	Rp 22.021.000,00	Rp 31.276.000,00	Rp 51.584.000,00	Rp 64.517.000,00	Rp 110.255.000,00	Rp 55.964.600,00	Rp 55.930.600,00
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 4.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 6.400.000,00	Rp 3.970.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 11.993.000,00	Rp 8.940.000,00	Rp 6.400.000,00	Rp 8.080.000,00	Rp 8.060.600,00
8.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 36.922.800,00	Rp 50.793.500,00	Rp 44.383.500,00	Rp 53.413.000,00	Rp 48.507.000,00	Rp 36.921.000,00	Rp 50.792.000,00	Rp 44.382.000,00	Rp 53.412.000,00	Rp 48.502.000,00	Rp 46.803.960,00	Rp 46.801.800,00
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 45.764.250,00	Rp 58.875.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 47.175.000,00	Rp 51.350.000,00	Rp 45.759.500,00	Rp 58.874.000,00	Rp 53.994.500,00	Rp 47.140.000,00	Rp 51.329.000,00	Rp 51.432.850,00	Rp 51.419.400,00
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 36.560.000,00	Rp 8.080.000,00	Rp 45.240.000,00	Rp -	Rp 34.850.000,00	Rp 35.992.000,00	Rp 8.080.000,00	Rp 45.240.000,00	Rp -	Rp 33.550.000,00	Rp 31.182.500,00	Rp 30.715.500,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 9.750.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 15.500.000,00	Rp 11.000.000,00	Rp 9.715.000,00	Rp 9.472.000,00	Rp 11.470.000,00	Rp 15.430.000,00	Rp 10.980.000,00	Rp 11.450.000,00	Rp 11.413.400,00
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 22.625.000,00	Rp 41.950.000,00	Rp 48.500.000,00	Rp 53.750.000,00	Rp 48.600.000,00	Rp 22.621.000,00	Rp 41.949.000,00	Rp 48.494.500,00	Rp 53.721.500,00	Rp 48.568.000,00	Rp 43.085.000,00	Rp 43.070.800,00
13.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 332.325.500,00	Rp 325.098.633,00	Rp 504.356.750,00	Rp 527.762.676,00	Rp 666.970.174,00	Rp 332.192.489,00	Rp 325.039.491,00	Rp 504.015.571,00	Rp 527.205.977,00	Rp 666.104.759,00	Rp 471.302.746,60	Rp 470.911.657,40
II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Rp 36.775.000,00	Rp 36.616.329,00	Rp 42.430.000,00	Rp 53.350.000,00	Rp 34.000.000,00	Rp 36.614.166,00	Rp 36.597.000,00	Rp 42.329.197,00	Rp 53.274.720,00	Rp 33.796.000,00	Rp 62.769.599,13	Rp 62.609.909,93
1.	Pengadaan Meubelair	Rp 18.260.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.140.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.330.000,00	Rp 13.270.000,00
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 18.515.000,00	Rp 28.216.329,00	Rp 17.100.000,00	Rp 22.000.000,00	Rp 28.000.000,00	Rp 18.474.166,00	Rp 28.197.000,00	Rp 17.003.197,00	Rp 21.934.020,00	Rp 27.870.000,00	Rp 22.766.265,80	Rp 22.695.676,60
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp 16.330.000,00	Rp 18.350.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.330.000,00	Rp 18.350.000,00	Rp -	Rp 17.340.000,00	Rp 17.340.000,00
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp 9.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 8.996.000,00	Rp 12.990.700,00	Rp 5.926.000,00	Rp 9.333.333,33	Rp 9.304.233,33

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Rp -	Rp -	Rp 36.750.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 36.750.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp 35.016.666,67	Rp 35.016.666,67
	1. Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Rp -	Rp -	Rp 19.600.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 19.600.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp 17.866.666,67	Rp 17.866.666,67
	3. Pengadaan Pakaian Olahraga	Rp -	Rp -	Rp 17.150.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.150.000,00	Rp -	Rp -	Rp 17.150.000,00	Rp 17.150.000,00
IV.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Rp 151.389.000,00	Rp 54.526.121,00	Rp 111.800.000,00	Rp 173.798.704,00	Rp 107.750.000,00	Rp 93.756.200,00	Rp 54.526.121,00	Rp 100.569.428,00	Rp 161.643.066,00	Rp 107.162.140,00	Rp 201.246.665,00	Rp 151.000.191,00
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 46.342.000,00	Rp 31.776.000,00	Rp 96.000.000,00	Rp 108.394.079,00	Rp 77.800.000,00	Rp 30.397.200,00	Rp 31.776.000,00	Rp 84.792.228,00	Rp 108.394.079,00	Rp 77.274.940,00	Rp 72.062.415,80	Rp 66.526.889,40
	2. Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Rp 89.403.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.419.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 89.403.000,00	Rp 51.419.000,00
	3. Pelaksanaan Penilaian AKJG	Rp 15.644.000,00	Rp 22.250.121,00	Rp 15.800.000,00	Rp 32.999.625,00	Rp 29.950.000,00	Rp 11.940.000,00	Rp 22.250.121,00	Rp 15.777.200,00	Rp 32.636.987,00	Rp 29.887.200,00	Rp 23.328.749,20	Rp 22.498.301,60
	4. Seminar, simposium, lokakarya, dan pertemuan ilmiah	Rp -	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 32.405.000,00	Rp -	Rp -	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 20.612.000,00	Rp -	Rp 16.452.500,00	Rp 10.556.000,00
V.	<b>SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Rp 69.849.000,00	Rp 85.191.500,00	Rp 136.217.500,00	Rp 267.922.500,00	Rp 208.848.500,00	Rp 65.431.000,00	Rp 84.290.500,00	Rp 105.385.000,00	Rp 212.611.014,00	Rp 205.477.000,00	Rp 305.983.100,00	Rp 225.925.714,67
	1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 8.839.000,00	Rp 12.091.500,00	Rp 12.725.000,00	Rp 15.325.000,00	Rp 12.850.000,00	Rp 8.833.000,00	Rp 12.091.500,00	Rp 11.951.000,00	Rp 14.485.000,00	Rp 12.700.000,00	Rp 12.366.100,00	Rp 12.012.100,00
	2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp 27.655.500,00	Rp 39.055.500,00	Rp 34.040.000,00	Rp 46.442.000,00	Rp 48.843.000,00	Rp 27.647.500,00	Rp 39.054.000,00	Rp 33.268.000,00	Rp 40.175.000,00	Rp 48.811.000,00	Rp 39.207.200,00	Rp 37.791.100,00
	3. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Rp 9.091.500,00	Rp 17.652.000,00	Rp 21.500.000,00	Rp 33.462.500,00	Rp 26.227.500,00	Rp 9.091.500,00	Rp 17.394.000,00	Rp 20.483.000,00	Rp 32.671.000,00	Rp 26.192.000,00	Rp 21.586.700,00	Rp 21.166.300,00
	4. Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Rp 24.263.000,00	Rp 16.392.500,00	Rp 24.335.000,00	Rp 21.882.500,00	Rp 18.402.500,00	Rp 19.859.000,00	Rp 15.751.000,00	Rp 23.978.000,00	Rp 21.531.000,00	Rp 18.354.000,00	Rp 21.055.100,00	Rp 19.894.600,00
	5. Reviu LAKIP Kota Bima	Rp -	Rp -	Rp 16.205.000,00	Rp 20.270.000,00	Rp 19.430.000,00	Rp -	Rp -	Rp 15.705.000,00	Rp 20.235.000,00	Rp 19.391.000,00	Rp 18.635.000,00	Rp 18.443.666,67
	6. Reviu RKA	Rp -	Rp -	Rp 27.412.500,00	Rp 34.275.000,00	Rp 45.270.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 42.432.000,00	Rp 106.957.500,00	Rp 42.432.000,00
	7. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23.962.500,00	Rp 20.522.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.877.132,00	Rp 20.294.000,00	Rp 22.242.500,00	Rp 21.585.566,00
	8. Evaluasi Pelayanan Publik	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.667.000,00	Rp -	Rp 14.200.000,00	Rp 8.667.000,00
	9. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34.043.000,00	Rp 17.303.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33.376.000,00	Rp 17.303.000,00	Rp 25.673.000,00	Rp 25.339.500,00
	10. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 24.060.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.593.882,00	Rp -	Rp 24.060.000,00	Rp 18.593.882,00
VI.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA</b>	Rp 89.943.200,00	Rp 121.975.000,00	Rp 37.664.251,00	Rp 104.950.470,00	Rp 132.339.500,00	Rp 60.434.000,00	Rp 121.427.528,00	Rp 37.518.751,00	Rp 102.154.151,00	Rp 128.441.946,00	Rp 159.079.116,60	Rp 149.712.145,70
	1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 89.943.200,00	Rp 121.975.000,00	Rp 37.664.251,00	Rp 15.748.362,00	Rp 15.859.500,00	Rp 60.434.000,00	Rp 121.427.528,00	Rp 37.518.751,00	Rp 15.703.862,00	Rp 15.836.000,00	Rp 56.238.062,60	Rp 50.184.028,20
	2. Review Penyerapan Anggaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 71.140.000,00	Rp 89.640.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 68.938.181,00	Rp 85.795.846,00	Rp 80.390.000,00	Rp 77.367.013,50
	3. Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.062.108,00	Rp 26.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.512.108,00	Rp 26.810.100,00	Rp 22.451.054,00	Rp 22.161.104,00

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	Rp 970.173.850,00	Rp 1.022.322.627,00	Rp 1.993.416.337,00	Rp 1.960.862.600,00	Rp 1.812.451.826,00	Rp 920.246.824,00	Rp 1.018.842.841,00	Rp 1.985.546.502,00	Rp 1.913.712.887,00	Rp 1.785.580.637,00	Rp 1.682.249.128,00	Rp 1.653.161.934,87
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Rp 468.218.250,00	Rp 608.620.000,00	Rp 767.550.000,00	Rp 815.400.000,00	Rp 709.580.000,00	Rp 467.418.000,00	Rp 608.414.050,00	Rp 762.380.000,00	Rp 800.291.000,00	Rp 706.553.000,00	Rp 673.873.650,00	Rp 669.011.210,00
2.	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Rp 130.233.000,00	Rp 58.215.000,00	Rp 286.106.128,00	Rp 276.235.000,00	Rp 307.800.000,00	Rp 96.307.000,00	Rp 56.195.000,00	Rp 285.996.128,00	Rp 275.514.000,00	Rp 297.160.000,00	Rp 211.717.825,60	Rp 202.234.425,60
3.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp -	Rp -	Rp 281.250.000,00	Rp 173.972.600,00	Rp 117.550.000,00	Rp -	Rp -	Rp 280.952.000,00	Rp 172.039.600,00	Rp 117.545.000,00	Rp 190.924.200,00	Rp 190.178.866,67
4.	inventarisasi hasil temuan pengawasan	Rp -	Rp 19.385.000,00	Rp 23.585.000,00	Rp 22.760.000,00	Rp 18.860.000,00	Rp -	Rp 19.383.000,00	Rp 23.286.000,00	Rp 15.773.000,00	Rp 18.824.000,00	Rp 21.147.500,00	Rp 19.316.500,00
5.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Rp 183.876.600,00	Rp 227.065.000,00	Rp 341.625.000,00	Rp 420.530.000,00	Rp 315.145.000,00	Rp 180.224.500,00	Rp 226.657.000,00	Rp 340.325.000,00	Rp 417.896.000,00	Rp 315.058.000,00	Rp 297.648.320,00	Rp 296.032.100,00
6.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Rp 145.074.000,00	Rp 86.372.627,00	Rp 142.010.209,00	Rp 177.650.000,00	Rp 298.777.826,00	Rp 141.576.324,00	Rp 85.531.791,00	Rp 141.987.874,00	Rp 175.048.287,00	Rp 295.834.637,00	Rp 169.976.932,40	Rp 167.995.782,60
7.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Rp 42.772.000,00	Rp 22.665.000,00	Rp 32.575.000,00	Rp 27.015.000,00	Rp 44.739.000,00	Rp 34.721.000,00	Rp 22.662.000,00	Rp 31.950.000,00	Rp 14.350.000,00	Rp 34.606.000,00	Rp 33.953.200,00	Rp 27.657.800,00
8.	Pendayagunaan TP/TGR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9.	Pemantauan LHKASN	Rp -	Rp -	Rp 118.715.000,00	Rp 47.300.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 118.669.500,00	Rp 42.801.000,00	Rp -	Rp 83.007.500,00	Rp 80.735.250,00
VIII.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIO-NALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	Rp 144.381.000,00	Rp 101.358.152,00	Rp 133.764.912,00	Rp 175.025.050,00	Rp 215.815.000,00	Rp 141.442.309,00	Rp 99.718.302,00	Rp 127.226.214,00	Rp 142.535.998,00	Rp 210.435.466,00	Rp 172.907.496,13	Rp 160.420.416,47
1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Rp 115.981.000,00	Rp 62.558.152,00	Rp 53.365.000,00	Rp 41.735.000,00	Rp 26.295.000,00	Rp 113.596.000,00	Rp 62.101.552,00	Rp 50.855.000,00	Rp 32.770.000,00	Rp 21.655.000,00	Rp 59.986.830,40	Rp 56.195.510,40
2.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp 28.400.000,00	Rp 38.800.000,00	Rp 56.399.912,00	Rp 70.000.000,00	Rp 135.520.000,00	Rp 27.846.309,00	Rp 37.616.750,00	Rp 56.399.912,00	Rp 62.600.049,00	Rp 134.802.027,00	Rp 65.823.982,40	Rp 63.853.009,40
3.	Bimtek Pengawasan Operasional	Rp -	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp 63.290.050,00	Rp 54.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 19.971.302,00	Rp 47.165.949,00	Rp 53.978.439,00	Rp 47.096.683,33	Rp 40.371.896,67
IX.	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN</b>	Rp 38.960.000,00	Rp 27.297.000,00	Rp 42.140.000,00	Rp 28.575.000,00	Rp -	Rp 36.460.000,00	Rp 26.539.000,00	Rp 37.633.000,00	Rp 23.399.000,00	Rp -	Rp 34.243.000,00	Rp 31.007.750,00
1.	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp 38.960.000,00	Rp 27.297.000,00	Rp 42.140.000,00	Rp 28.575.000,00	Rp -	Rp 36.460.000,00	Rp 26.539.000,00	Rp 37.633.000,00	Rp 23.399.000,00	Rp -	Rp 34.243.000,00	Rp 31.007.750,00

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000,00	Rp -	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000,00	Rp -	Rp 20.600.000,00	Rp 13.100.000,00
1.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000,00	Rp -	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000,00	Rp -	Rp 20.600.000,00	Rp 13.100.000,00
XI.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Rp -	Rp -	Rp 27.700.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.990.000,00	Rp 3.990.000,00	Rp -	Rp 15.850.000,00	Rp 11.990.000,00
1.	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp 27.700.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.990.000,00	Rp 3.990.000,00	Rp -	Rp 15.850.000,00	Rp 11.990.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 2.140.000.000,00</b>	<b>Rp 2.117.618.262,00</b>	<b>Rp 3.474.311.250,00</b>	<b>Rp 3.725.000.000,00</b>	<b>Rp 3.700.000.000,00</b>	<b>Rp 1.975.304.201,00</b>	<b>Rp 2.110.090.568,00</b>	<b>Rp 3.403.719.091,00</b>	<b>Rp 3.568.278.580,00</b>	<b>Rp 3.656.140.144,00</b>	<b>Rp 3.031.385.902,40</b>	<b>Rp 2.942.706.516,80</b>
							92,30%	99,64%	97,97%	95,79%	98,81%	20,00%	20,00%

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa pagu anggaran Inspektorat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2019. Demikian juga yang terjadi pada realisasi penggunaan anggaran dimana terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan apabila dipotret antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pengalokasian anggaran pelayanan pengawasan sebagaimana tertuang dalam tabel diatas belum dikatakan ideal yang disebabkan oleh porsi anggaran pengawasan seharusnya 1(satu) persen dari total APBD atau rata- rata sebesar 8.000.000.000 pertahun untuk belanja langsung.

### 2.3. Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bima melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bima tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan maupun *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kota Bima. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bima

Berdasarkan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 36 Tahun 2016 menetapkan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari:

- Sekretaris
  - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari
- Irban Wilayah I
  - Irban Wilayah II
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD ) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat, antara lain :

1. Jabatan Fungsional Auditor
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal
  - a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat.
  - b. Masih kurangnya jumlah Auditor dan P2UPD yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu hanya sebanyak orang, sedangkan berdasarkan analisis terdahulu seharusnya Inspektorat Kota Bima memiliki 41 orang Auditor, dan P2UPD hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat.
  - c. Sampai tahun ini ( 2019 ) Inspektorat Kota Bima belum memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai terutama Gedung kantor sehingga



sangat berpengaruh sekali dengan etos kerja pegawai, kerahasiaan kerja, keamanan penyimpanan Arsip dan dokumen.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dan P2UPD dalam pelaksanaan diklat teknis pengawasan.
- b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya Bintel Penulisan LHP yang Efektif.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Bima dengan permasalahan tersebut diatas, Inspektorat Kota Bima memiliki dukungan sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah keseluruhan pegawai Inspektorat Kota Bima adalah :

Eselon II	:	1 Orang
Eselon III	:	4 Orang
Eselon IV	:	2 Orang
Jabatan Fungsional	:	32 Orang
Staf	:	16 Orang
Jumlah		55 Orang

Bedasarkan tingkat pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pendidikan Strata III	:	0 Orang
Pendidikan Strata II	:	9 Orang
Pendidikan Strata I	:	40 Orang
Pendidikan SMA	:	6 Orang
Jumlah		55 Orang

Dari jumlah 55 pegawai, Inspektorat Kota Bima mempunyai tenaga pemeriksa dan telah memiliki sertifikat serta telah diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 32 orang :

1. 19 Orang Auditor
2. 13 Orang P2UPD

Dengan pembagian kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Pada Inspektorat Kota Bima dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Auditor :
  - a. Auditor Madya : 2 Orang
  - b. Auditor Muda : 12 Orang
  - c. Auditor Pertama : 5 Orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD) :
  - a. Pengawas Pemerintahan Madya: - Orang
  - b. Pengawas Pemerintah Muda : 8 Orang
  - c. Pengawas Pemerintah Pertama : 5 Orang

Sedangkan pegawai yang telah memiliki sertifikat auditor dan sertifikat P2UPD dari jabatan non auditor dan P2UPD dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 5 orang :

1. Jabatan Fungsional Auditor :
  - a. Auditor Madya : 0 Orang
  - b. Auditor Muda : 2 Orang
  - c. Auditor Pertama : 0 Orang
  - Jumlah : 2 Orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD) :
  - a. Pengawas pemerintah Madya : 1 Orang
  - b. Pengawas pemerintah Muda : 2 Orang
  - c. Pengawas Pemerintah Pertama : 0 Orang
  - Jumlah : 3 Orang

2. Sarana dan prasarana .

Sarana dan prasarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;

- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat dan sumber daya yang dimiliki, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2. Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.

Dari uraian tersebut diatas, Inspektorat Kota Bima mengambil langkah – langkah penyelesaian sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah tenaga aparatur pemeriksa melalui rekrutmen pegawai atau mutasi pegawai;
2. Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional Pembentukan dan Penjenjangan JFA;
3. Peningkatan kompetensi melalui diklat teknis substantif;
4. Pengoptimalan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan;
5. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut;

6. Perlu adanya Gelar pengawasan secara berkala dan Rapat Pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan;
7. Melakukan pendekatan kepada Tim TAPD untuk meningkatkan lagi alokasi anggaran Pengawasan Inspektorat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping permasalahan/kendala dan isu – isu Inspektorat Kota Bima mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
2. Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota Bima;
3. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP, Pusbin Depdagri serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
4. Adanya semangat Pemerintah Kota Bima untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menyelenggaraan tata kelola pemerinatahn yang baik;
5. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Bima;
6. Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.

Tantangan, isu dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kota Bima untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima.

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Dalam pelaksanaanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengalami perubahan di sesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan besaran belanja maka perlu diadakan reviu terhadap Rancangan Kerja Awal RKPD . Adapun reviu tersebut tergambar pada tabel berikut:

**TABEL. 2.4.1**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KOTA BIMA**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Prosentase administrasi perkantoran tersedia.</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.306.899.550</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Prosentase administrasi perkantoran tersedia.</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.306.899.550</b>
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	1100 EKs	248.100.000,00	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	1100 EKs	248.100.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	100%	18.500.000,00	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	Persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	100%	18.500.000,00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	10 Unit	3.600.000,00	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	10 Unit	3.600.000,00
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	4.950.000,00	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	4.950.000,00
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2 Dok	64.644.000,00	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2 Dok	64.644.000,00
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	8 Ruangan	33.683.800,00	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	8 Ruangan	33.683.800,00

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	10 Unit	4.800.000,00	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Bima	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	10 Unit	4.800.000,00
8	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	1485 BH/PCS/Rim	39.443.000,00	8	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	1485 BH/PCS/Rim	39.443.000,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	155.000 Lembar	59.053.750,00	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	155.000 Lembar	59.053.750,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	58.700.000,00	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	58.700.000,00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah bahan bacaan	5 Dok	33.100.000,00	11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah bahan bacaan	5 Dok	33.100.000,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	75 Orang	94.125.000,00	12	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	75 Orang	94.125.000,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	16 laporan	644.200.000,00	13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	16 laporan	644.200.000,00

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.189.080</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.189.080</b>
1 Pengadaan Mebeleur	Kota Bima	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia	10 Unit	35.200.000,00	1 Pengadaan Mebeleur	Kota Bima	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia	10 Unit	35.200.000,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	8 Ruangan	22.000.000,00	2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Kota Bima	Jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	8 Ruangan	22.000.000,00
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	27.989.080,00	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6 Unit	27.989.080,00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah aparatur yang tidak mendapatkan sanksi disiplin</b>	<b>51 Org</b>	<b>12.500.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah aparatur yang tidak mendapatkan sanksi disiplin</b>	<b>0 Org</b>	<b>-</b>
1 Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN	52 Lembar	12.500.000,00	1 Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Kota Bima	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN	0 Lembar	-
2 Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk ASN			2 Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk ASN		

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah APIP yang mengikuti diklat pembentukan/Inpasing/diklat PIM</b>	<b>12,50%</b>	<b>53.050.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah APIP yang mengikuti diklat pembentukan/Inpasing/diklat PIM</b>	<b>12,50%</b>	<b>53.050.000</b>
1 Pelaksanaan Penilaian AKJG	Kota Bima	Jumlah ASN Fungsional yang dinilai AKJG	32 Orang	22.050.000,00	1 Pelaksanaan Penilaian AKJG	Kota Bima	Jumlah ASN Fungsional yang dinilai AKJG	32 Orang	22.050.000,00
2 Pengelolaan Website dan aplikasi	Kota Bima	Jumlah Website yang tertangani	10 Website	31.000.000,00	2 Pengelolaan Website dan aplikasi	Kota Bima	Jumlah Website yang tertangani	10 Website	31.000.000,00
3 Seminar, Smposium, Lokakarya dan pertemuan ilmiah	Kota Bima	Jumlah APIP yang bersertifikasi			3 Seminar, Smposium, Lokakarya dan pertemuan ilmiah	Kota Bima	Jumlah APIP yang bersertifikasi		
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan APIP</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.550.000</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan APIP</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.060.000</b>
1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan Keuangan	2 Dok	29.350.000,00	1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan Keuangan	2 Dok	13.010.000,00
2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	5 Dok	135.350.000,00	2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	5 Dok	36.274.000,00



RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja yang terselesaikan	3 Dok	55.850.000,00	3 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja yang terselesaikan	3 Dok	25.776.000,00
<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan SAP</b>	<b>Sesuai</b>	<b>862.050.000</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan SAP</b>	<b>Sesuai</b>	<b>731.725.000</b>
1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SPI	34 OPD	68.825.000,00	1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SPI	34 OPD	48.400.000,00
2 Reviu Penyerapan anggaran	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	100,00%	72.075.000,00	2 Reviu Penyerapan anggaran	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	100,00%	172.250.000,00
3 Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	99,00%	138.825.000,00	3 Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa	Kota Bima	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	99,00%	135.975.000,00
4 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dievaluasi	99,00%	44.075.000,00	4 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dievaluasi	99,00%	32.725.000,00
5 Reviu LAKIP Kota Bima	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu SAKIP	1 Dok	72.075.000,00	5 Reviu LAKIP Kota Bima	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu SAKIP	1 Dok	56.750.000,00
6 Reviu RKA	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu RKA	1 Dok	44.075.000,00	6 Reviu RKA	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu RKA	1 Dok	32.325.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dok	74.325.000,00	7	Penilaian mandiri Reformasi birokrasi	Kota Bima	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dok	57.825.000,00
8	Verifikasi Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kota Bima	Jumlah Dokumen laporan yang dilakukan verifikasi	2 Dok	107.625.000,00	9	Verifikasi Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Kota Bima	Jumlah Dokumen laporan yang dilakukan verifikasi	2 Dok	53.025.000,00
9	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi SAKIP	1 Dok	107.825.000,00	4	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi SAKIP	1 Dok	86.925.000,00
10	Evaluasi pelayanan publik	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dok	132.325.000,00	8	Evaluasi pelayanan publik	Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dok	55.525.000,00
11	Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran hasil evaluasi	-	-	10	Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Kota Bima	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran hasil evaluasi	-	-
<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>Kota Bima</b>	<b>Porsentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK</b>	<b>88,24%</b>	<b>2.363.975.000</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>Kota Bima</b>	<b>Porsentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK</b>	<b>88,24%</b>	<b>1.774.525.000</b>
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	37 Dok	938.450.000,00	1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	37 Dok	578.860.000,00
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	8 Dok	160.600.000,00	2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	8 Dok	308.060.000,00

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Bima	Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Probity dan Money)	6 OPD	247.950.000,00	3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Bima	Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Probity dan Money)	6 OPD	53.700.000,00
4 Invetarisasi temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Invetarisasi temuan pengawasan	2 Dok	53.000.000,00	4 Inverisasi temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Invetarisasi temuan pengawasan	2 Dok	25.175.000,00
5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneq	125 Dok	307.500.000,00	5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kota Bima	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneq	125 Dok	239.000.000,00
6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pengawasan	17 Dok	170.000.000,00	6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pengawasan	17 Dok	230.505.000,00
7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	4 Dok	195.075.000,00	7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	4 Dok	56.475.000,00
8 Pemantauan LHKASN	Kota Bima	Persentase SN yang menyampaikan LHKASN dan LHKPN	65%	123.000.000,00	8 Pemantauan LHKASN	Kota Bima	Persentase SN yang menyampaikan LHKASN dan LHKPN	65%	60.900.000,00
9 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kapabilitas APiP	Kota Bima	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APiP	3 Dok	59.075.000,00	9 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kapabilitas APiP	Kota Bima	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APiP	3 Dok	44.525.000,00

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prgram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kota Bima	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	6 Dok	74.325.000,00	10 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kota Bima	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	6 Dok	130.925.000,00
11 Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	1 Dok	35.000.000,00	11 Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	Kota Bima	Jumlah Laporan Pelaksanaan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	1 Dok	46.400.000,00
<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, substansi, penjenjangan, dan profesi</b>	<b>66,67%</b>	<b>374.940.000</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, substansi, penjenjangan, dan profesi</b>	<b>66,67%</b>	<b>622.060.000</b>
1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	2 Orang	75.000.000,00	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	2 Orang	356.620.000,00
2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Substantif	32 Orang	180.000.000,00	2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Substantif	32 Orang	199.080.000,00
3 Bimtek Pengawasan Operasional	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Pengawasan Operasioanl	32 Orang	119.940.000,00	3 Bimtek Pengawasan Operasional	Kota Bima	Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Pengawasan Operasioanl	32 Orang	66.360.000,00

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kota belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB**

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas maka kebijakan nasional pengawasan terdiri dari dua hal pokok yaitu pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi : pembinaan kepada propinsi dilakukan oleh Menteri, untuk pembinaan umum; dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk pembinaan teknis; sedangkan pembinaan untuk kabupaten dan Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. Adapun pembinaan Umum yang menjadi kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pcmbangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bcntuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan ke daerah kabupaten/kota.

Disamping kebijakan nasional terkait pembinaan umum dan teknis terdapat pula kebijakan pengawasan penyelenggaraan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan propinsi, kabupaten dan Kota yang dilakukan pada setiap tingkatan berupa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dilakukan oleh Menteri, untuk pengawasan umum; dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk pengawasan teknis;

sedangkan pengawasan untuk kabupaten dan Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Adapun pengawasan Umum yang menjadi kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengawasan teknis sebagaimana dijelaskan diatas meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan diatas maka perlu didukung oleh perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Bima sebagai pembantu Walikota Bima dalam melaksanakan fungsi pengawasan di daerah oleh karena itu tentunya harus memiliki Tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, maka Inspektorat Kota Bima Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan Visi

Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2018 - 2023 yaitu ” **Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri** ”. dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tepatnya Misi ketiga yaitu **Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** sebagai bagian dari rencana strategi organisasi Inspektorat Kota Blima. Dengan adanya Visi dan Misi pembangunan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai alat untuk menguasai dan mengendalikan jalanya organisasi Inspektorat sehingga manajemen (pengelolaan ) sesuai dengan tujuan organisasi yaitu pengawasan yang efektif, efisien dan tepat guna sehingga tercipta Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri.

Untuk mencapai efektifitas pengawasan yang lebih tinggi Inspektorat Daerah Kota Bima dalam melaksanakan tugas pengawasan perlu memperhatikan kode etik dan standar pengawasan sebagai salah satu pedoman selaku Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah ( APFP ). Adapun standar pemeriksaan APFP adalah sebagai berikut:

1. Standar umum
2. Standar Koordinasi dan kendali mutu
3. Standar pelaksanaan
4. Standar laporan
5. Standar tindak lanjut.

Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Inspektorat Kota Bima akan berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Inspektorat dengan meningkatkan kompetensi aparatur dan menambah kuantitas aparatur. Sehingga diharapkan *output* dari pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan akan semakin mendekati Standar Pelaporan Audit.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.**

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Bima tentunya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam renstra Inspektorat oleh karena itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Bima dalam pelaksanaan RENJA tahun 2021 ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :



1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Mewujudkan Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam ukuran waktu tertentu (tahunan) yang merupakan rencana tindakan aksi dan alokasi sumber daya dan dana yang tersedia. Untuk itu Inspektorat Kota Bima menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kota Bima :

**Tabel 3.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bima yang Merupakan Tanggung Jawab Inspektorat</b>							
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	B (65,58)	BB (70,01)	BB (72,00)	A (80,00)	A (85,00)
<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat</b>							
Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	60,98%	70,73%	80,49%	90,24%	100,00 %
Rumus Target : Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil Tahun N dibagi dengan total jumlah (41 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
pemerintahan daerah	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Target OPD tahun N	25	29	33	37	41
		Realisasi : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil tahun N dengan total jumlah (41 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%					
		Capaian : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil tahun N dibagi target jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil tahun N dikali 100%					
		Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%
		Target : ditentukan dengan persentase yang diharapkan tercapai Pertahun					
		Realisasi : Jumlah penyelesaian temuan yang di tindaklanjuti sampai dengan Tahun N dibagi dengan total jumlah temuan sampai dengan tahun N (temuan APIP dan BPK) dikali 100%					
		Capaian : Persentase realisasi penyelesaian temuan yang ditindak lanjut dibagi persentase target dikali 100%					
		Persentase hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dengan nilai minimal B.	93,10%	82,35%	88,24%	92,12%	100,00%
		Rumus Target : : Jumlah SKPD target Tahun N dibagi dengan jumlah 29 SKPD s/d tahun 2019 dan tahun 2020 s/d 2023 sebanyak 34 SKPD dikali 100%					
		Target OPD tahun N	27	28	30	32	34
		Rumus Realisasi : Realisasi SKPD bernilai (B) tahun N dibagi dengan jumlah (29 dan atau 34) target SKPD dikali 100%					
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi target tahun N dikali 100%					
		Hasil Assurance Perwakilan Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Berkembang (2,80)	Terdefinis (3,10)	Terdefinis (3,40)	Terdefinis (3,60)	Terdefinis (3,80)
		Target : ditentukan dengan rencana tingkat capaian Pertahun					
		Realisasi : Realisasi tahun N					
		Capaian : Realisasi dibagi target dikali 100%					
		Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%
		Rumus Target : Jumlah OPD target Tahun N dibagi dengan jumlah 10 OPD s/d tahun 2023 dikali 100%					
		Jumlah Target OPD tahun N	2	2	4	6	8
		Rumus Realisasi : Realisasi OPD tahun N dibagi dengan jumlah target (10) OPD dikali 100%					
Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi target tahun N dikali 100%							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kota Bima	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
		Target : ditentukan dengan rencana tingkat capaian Pertahun					
		Realisasi : Realisasi tahun N					
		Capaian tahun N					
		Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	33	35	37	39	41
		Rumus Target : Jumlah rencana ASN Tahun N					
		Realisasi : Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat tahun N dibagi dengan total target tahun N dikali 100%					
		Capaian : Realisasi tahun N dibagi target tahun N dikali 100%					

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai visi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner perlu didukung oleh tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima sebagai acuan unsur organisasi Inspektorat dan menjalankan tugas dan fungsi dalam kurun 5 tahun dan tahunan. Adapun, indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima serta program dan kegiatan serta sasarnya masing – masing Sebagai Berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima Tahun 2021**

Sasaran Inspektorat	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator		Target	
1	2	3		4	
1 Meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1 Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	Target	Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil Tahun N (29 OPD) dibagi dengan total jumlah (41 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%	70,73%	
		Realisasi	Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil tahun N dengan total jumlah (41 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%		
		Capaian	Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil tahun N dibagi target jumlah OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil tahun N dikali 100%		
	1.2 Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	Target	Ditentukan dengan persentase yang diharapkan tercapai Tahun N		92,00%
		Realisasi	Jumlah penyelesaian temuan yang di tindaklanjuti sampai dengan Tahun N dibagi dengan total jumlah temuan sampai dengan tahun N (temuan APIP dan BPK) dikali 100%		
		Capaian	Persentase realisasi penyelesaian temuan yang ditindak lanjut dibagi persentase target dikali 100%		
	1.3 Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Target	Ditentukan dengan rencana tingkat capaian Tahun N		Terdefinisi (3,10)
		Realisasi	Realisasi tahun N		
		Capaian	Realisasi dibagi target dikali 100%		

Sasaran Inspektorat	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Target	
1	2	3	4	
	14 Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Target	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal B (28 OPD) dibagi dengan jumlah 34 OPD dikali 100%	82,35%
		Realisasi	Realisasi OPD dengan nilai SAKIP minimal (B) tahun N dibagi dengan jumlah (34) SKPD dikali 100%	
		Capaian	Realisasi tahun N dibagi target tahun N dikali 100%	
	1.5 Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Target	Jumlah SKPD target Tahun N (2) OPD dibagi dengan jumlah 10 OPD s/d tahun 2023 dikali 100%	20,00%
		Realisasi	Realisasi OPD tahun N dibagi dengan jumlah terget (10) OPD dikali 100%	
		Capaian	Realisasi tahun N dibagi target tahun N dikali 100%	
2 Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.1 Level Kapabilitas APIP	Target	Ditentukan dengan rencana tingkat capaian Pertahun	3
		Realisasi	Realisasi tahun N	
		Capaian	Capaian tahun N	
	2.2 Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	Target	Jumlah rencana ASN Tahun N	35
		Realisasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat tahun N dibagi dengan total terget tahun N dikali 100%	
		Capaian	Realisasi tahun N dibagi target tahun N dikali 100%	

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima sebagaimana diterakan dalam tabel 3.3.1 diatas maka program kegiatan pendukung utama yang diperlukan sebagai tolak ukur Rencana Kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Indikator Kinerja Utama dan Porgram Kegiatan Utama Tahun 2021**

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1 Opini BPK	WTP	1 Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1 Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	70,73%	1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material	Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	88,24%	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)
				1.2 Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	92,00%					Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Tertanganinya Pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksan Pengaduan
				1.3 Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Terdefinisi (3,10)					Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pencegahan penyimpangan perencanaan, pelaksanaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah Laporan saber Pungli Kota Bima
												Jumlah OPD yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Proby dan Move)

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Inventarisasi hasil temuan	Tersedianya dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen Hasil Inverisasi temuan pengawasan
										Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Terlaksanannya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK	Jumlah Laporan hasil Pemantauan penyelesaian Atas Hasil Pemeriksaan
										Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya Koordinasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan
										Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	Terlaksananya Evaluasi Hasil temuan	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.
										Pemantauan LHKASN	Meningkatnya kesadaran ASN yang menyampaikan laporan Harta Kekayaan	Persentase ASN menyampaikan laporan Harta Kekayaan
										Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersedianya Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang terselesaikan



Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Maturitas APIP	Meningkatnya Maturitas APIP	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan maturitas APIP
						2 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI	Terdefinisi	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang Laporan keuangannya Sesuai dengan SAP dan SPI
										Review Penyerapan Anggaran	Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD
										Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran PBJ (belanja Modal)
										Review RKPD	Terciptanya kesesuaian Perencanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Kerja dengan DPA

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.2 Nilai SAKIP	BB (70,01)		1.4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	82,35%	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat	29,41%	Reviu LAKIP	Tersedianya Dokumen Reviu SAKIP Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu SAKIP
				1.5 Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/ WBBM	20,00%					Reviu RKA	Tersedianya Dokumen Reviu RKA Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA
										Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
										Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
										Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	
										Evaluasi Pelayanan Publik	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik	
2	Mewujudkan Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.	2.1 Level Kapabilitas APIP	3	2 Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.1 Level Kapabilitas APIP	3	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN APIP yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat	12,50%	Pelaksanaan Penilaian AKJG	Terlaksananya Penilaian AKJG	Jumlah ASN yang dinilai AKJG
					2.2 Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	35					Pengelolaan Website dan Aplikasi	Terkelolanya Website dengan baik	Jumlah Website OPD dan Aplikasi lainnya yang diisi/dikelola
							2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, substansi, penjurangan, dan profesi	66,67%	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Pendidikan penjurangan

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran OPD	IKU OPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Telaksananya Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Diklat Substantif
										Bimtek pengawasan Operasional	Telaksananya Bimtek pengawasan Operasional	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional
						3 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Manajemen APIP	Jumlah Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	6	Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	Tersedianya data- data pemenuhan komponen kapabilitas Level 3	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP

Untuk mendukung Porgram, Kegiatan dan Indikator kinerja utama maka terdapat program dan kegiatan untuk pendukung indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3.3**  
**Program Dan Kegiatan Rutin Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang dilayani	100%	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia dan terdistribusinya surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	1100
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	100%
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	6
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertata dan terpeliharanya kantor	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	8
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	10

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pelayanan penatausahaan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	1485
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan penatausahaan administrasi perkantoran	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	155.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5 Eks
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	75
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	16
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP	100%	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor	0
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor	0

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Jumlah ketersediaan mebeleur kantor	7
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Ruangan Kantor yang terpelihara	8
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	6
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan sanksi disiplin	4	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk APIP	0
				Pengadaan pakaian hari - hari tertentu	Terpenuhinya pakaian hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang tersedia untuk APIP	0
				Pengadaan Pakaian Olah Raga	Terpenuhinya Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk APIP	0
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Inspektorat	Persentase Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan inspektorat	100%	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan/RKA/ DPA	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	5
				Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya dokumen Laporan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen Aukuntabilitas Kinerja yang terselesaikan	3



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**INSPEKTORAT KOTA BIMA**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kota Bima dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Adapun program dan kegiatan dalam rencana kerja tahun anggaran 2021 terdiri dari 7 (tujuh) program dengan kegiatan pendukung sebanyak 45 (empat puluh lima). Berikut uraian dan rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

**Tabel IV.1**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Inspektorat Kota Bima**

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran tersedia.	Kota Bima	100,00%	1.306.899.550	APBD		100,00%	1.398.382.519
4.02.4.02.01.01.01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	Kota Bima	1100 EKs	248.100.000,00	APBD		1100 EKs	265.467.000
4.02.4.02.01.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	Kota Bima	100%	18.500.000,00	APBD		100%	19.795.000
4.02.4.02.01.01.03	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	Kota Bima	10 Unit	3.600.000,00	APBD		10 Unit	3.852.000
4.02.4.02.01.01.04	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	Kota Bima	6 Unit	4.950.000,00	APBD		6 Unit	5.296.500

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.01.07	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kota Bima	2 Dok	64.644.000,00	APBD		2 Dok	69.169.080
4.02.4.02.01.01.08	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	Kota Bima	8 Ruangan	33.683.800,00	APBD		8 Ruangan	36.041.666
4.02.4.02.01.01.09	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	Kota Bima	10 Unit	4.800.000,00	APBD		10 Unit	5.136.000
4.02.4.02.01.01.10	8 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	Kota Bima	1485 BH/PCS/Rim	39.443.000,00	APBD		1485 BH/PCS/Rim	42.204.010
4.02.4.02.01.01.11	9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	Kota Bima	155.000 Lembar	59.053.750,00	APBD		155.000 Lembar	63.187.513
4.02.4.02.01.01.112	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	10 Unit	58.700.000,00	APBD		10 Unit	62.809.000

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.01.15	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Kota Bima	5 Dok	33.100.000,00	APBD		5 Dok	35.417.000
4.02.4.02.01.01.17	12 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	Kota Bima	75 Orang	94.125.000,00	APBD		75 Orang	100.713.750
4.02.4.02.01.01.18	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Luar Kota	16 laporan	644.200.000,00	APBD		16 laporan	689.294.000
<b>4.02.4.02.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.189.080</b>	<b>APBD</b>		<b>100,00%</b>	<b>91.152.316</b>
4.02.4.02.01.02.10	1 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia	Kota Bima	10 Unit	35.200.000,00	APBD		10 Unit	37.664.000
4.02.4.02.01.02.22	2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan dan peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	Kota Bima	8 Ruangan	22.000.000,00	APBD		8 Ruangan	23.540.000

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.02.24	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	Kota Bima	6 Unit	27.989.080,00	APBD		6 Unit	29.948.316
<b>4.02.4.02.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase ASN APIP yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>12,50%</b>	<b>53.050.000</b>	<b>APBD</b>		<b>12,50%</b>	<b>56.763.500</b>
4.02.4.02.01.05.05	1 Pelaksanaan Penilaian AKJG	Jumlah ASN yang dinilai AKJG	Kota Bima	32 Orang	22.050.000,00	APBD		32 Orang	23.593.500
4.02.4.02.01.05.09	2 Pengelolaan Website dan aplikasi	Jumlah Website yang tertangani	Kota Bima	10 Website	31.000.000,00	APBD		10 Website	33.170.000
<b>4.02.4.02.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan APIP</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.060.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100,00%</b>	<b>80.314.200</b>
4.02.4.02.01.06.04	1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan Keuangan	Kota Bima	2 Dok	13.010.000,00	APBD		2 Dok	13.920.700

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.06.05	2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	Kota Bima	5 Dok	36.274.000,00	APBD		5 Dok	38.813.180
4.02.4.02.01.06.06	3 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja yang terselesaikan	Kota Bima	3 Dok	25.776.000,00	APBD		3 Dok	27.580.320
<b>4.02.4.02.01.18</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>Laporan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan SAP</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Sesuai</b>	<b>731.725.000</b>	<b>APBD</b>		<b>Sesuai</b>	<b>782.945.750</b>
4.02.4.02.01.18.07	1 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SPI	Kota Bima	34 OPD	48.400.000,00	APBD		34 OPD	51.788.000
4.02.4.02.01.18.08	2 Reviu Penyerapan anggaran	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	Kota Bima	100,00%	172.250.000,00	APBD		100,00%	184.307.500
4.02.4.02.01.18.09	3 Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa	Persentase Perbaikan atas Rekomendasi oleh SKPD	Kota Bima	99,00%	135.975.000,00	APBD		99,00%	145.493.250
4.02.4.02.01.18.11	4 Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Kota Bima	99,00%	32.725.000,00	APBD		99,00%	35.015.750

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.18.12	5 Reviu LAKIP Kota Bima	Jumlah dokumen laporan hasil reviu SAKIP	Kota Bima	1 Dok	56.750.000,00	APBD		1 Dok	60.722.500
4.02.4.02.01.18.13	6 Reviu RKA	Jumlah dokumen laporan hasil reviu RKA	Kota Bima	1 Dok	32.325.000,00	APBD		1 Dok	34.587.750
4.02.4.02.01.18.14	7 Penilaian mandiri Reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Kota Bima	1 Dok	57.825.000,00	APBD		1 Dok	61.872.750
4.02.4.02.01.18.15	8 Verivikasi Pelaporan Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Dokumen laporan yang dilakukan verifikasi	Kota Bima	2 Dok	53.025.000,00	APBD		2 Dok	56.736.750
4.02.4.02.01.18.17	9 Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi SAKIP	Kota Bima	1 Dok	86.925.000,00	APBD		1 Dok	93.009.750
4.02.4.02.01.18.18	10 Evaluasi pelayanan publik	Jumlah dokumen laporan hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Kota Bima	2 Dok	55.525.000,00	APBD		2 Dok	59.411.750
4.02.4.02.01.20	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Porsentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>88,24%</b>	<b>1.774.525.000</b>	<b>APBD</b>		<b>88,24%</b>	<b>1.774.525.000</b>

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.20.01	1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	Kota Bima	37 Dok	578.860.000,00	APBD		37 Dok	578.860.000,00
4.02.4.02.01.20.02	2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	Kota Bima	8 Dok	308.060.000,00	APBD		8 Dok	308.060.000,00
4.02.4.02.01.20.03	3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Probitly dan Monev)	Kota Bima	6 OPD	53.700.000,00	APBD		6 OPD	53.700.000,00
4.02.4.02.01.20.05	4 Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi temuan pengawasan	Kota Bima	2 Dok	25.175.000,00	APBD		2 Dok	25.175.000,00
4.02.4.02.01.20.06	5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneg	Kota Bima	125 Dok	239.000.000,00	APBD		125 Dok	239.000.000,00
4.02.4.02.01.20.07	6 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pengawasan	Kota Bima	17 Dok	230.505.000,00	APBD		17 Dok	230.505.000,00
4.02.4.02.01.20.08	7 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	Kota Bima	4 Dok	56.475.000,00	APBD		4 Dok	56.475.000,00



Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.20.10	8 Pemantauan LHKASN	Persentase SN yang menyampaikan LHKASN dan LHKPN	Kota Bima	65%	60.900.000,00	APBD		65%	60.900.000,00
4.02.4.02.01.20.11	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kapabilitas APIP	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	Kota Bima	3 Dok	44.525.000,00	APBD		3 Dok	44.525.000,00
4.02.4.02.01.20.12	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	Kota Bima	6 Dok	130.925.000,00	APBD		6 Dok	130.925.000,00
4.02.4.02.01.20.13	Pengendalian manajemen pelaksanaan Maturitas APIP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	Kota Bima	1 Dok	46.400.000,00	APBD		1 Dok	46.400.000,00
<b>4.02.4.02.01.21</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtansi, penjenjangan, dan profesi</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>66,67%</b>	<b>622.060.000</b>	<b>APBD</b>		<b>66,67%</b>	<b>665.604.200</b>
4.02.4.02.01.21.01	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	Kota Bima	2 Orang	356.620.000,00	APBD		2 Orang	381.583.400
4.02.4.02.01.21.02	2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Substantif	Kota Bima	32 Orang	199.080.000,00	APBD		32 Orang	213.015.600

Kode Rekening	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.01.21.03	3 Bimtek Pengawasan Operasional	Jumlah APIP yang mengikuti Bimtek Pengawasan Operasioanl	Kota Bima	32 Orang	66.360.000,00	APBD		32 Orang	71.005.200

## **BAB IV**

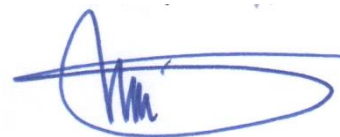
### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Kota Bima Tahun 2021 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023. Dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2021 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2021. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima karena tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil, serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Bima pada umumnya.

Inspektorat Kota Bima  
Inspektur,



**Muhaimin, SE**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP: 19620217 199003 1 010